

SKRIPSI
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM
LORONG WISATA DI KOTA MAKASSAR

A.TASYA AMELIA

E011191024



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

ABSTRAK

A.Tasya Ameilia (E011191024) dengan judul skripsi “*Collaborative Governance* Dalam Program Lorong Wisata di Kota Makassar” : 112 Halaman + 6 Tabel + 4 Gambar + Lampiran, Dibimbing oleh Dr. Suryadi Lambali, MA dan Amril Hans, S.AP., MPA

Salah satu cara pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat lorong adalah dengan membuat berbagai macam program yang dapat membuat masyarakat termotivasi untuk produktif dalam kehidupan sehari-hari salah satunya dengan dibentuknya program yang dinamakan lorong wisata. Dalam pelaksanaan program lorong wisata pemerintah Kota Makassar berkolaborasi dengan pihak swasta. Untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap kolaborasi dalam pelaksanaan program lorong wisata di Kota Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Program Lorong Wisata di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash dengan indikator yang digunakan yaitu Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan Fasilitatif, dan Proses Kolaborasi. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif melalui perolehan data primer yang bersumber dari wawancara dan observasi. Adapun data sekunder didapatkan dari Dinas Pariwisata Kota Makassar.

Hasil penelitian ini dikatakan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan masih adanya beberapa indikator yang belum maksimal yaitu pada indikator desain institusional dapat dikatakan belum maksimal karena pengarsipan bukti kerjasama yang memerlukan bukti fisik dan pada indikator proses kolaborasi para stakeholder perlu meningkatkan komitmen bersama serta memperhatikan saran-saran dari masyarakat lorong demi keberlangsungan program lorong wisata di Kota Makassar.

Kata Kunci : *Collaborative Governance*, Lorong Wisata



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

ABSTRACT

A.Tasya Ameilia (E011191024) with the thesis title “Collaborative Governance in the Tourist Alley Program in Makassar City” : 112 Pages + 6 Tables + 4 Figures + Appendix, Supervised by Dr. Suryadi Lambali, MA and Amril Hans, S.AP., MPA

One of the ways the government of Makassar City has improved the quality of life for the alley people is by making various programs that can motivate people to be productive in their daily lives, one of which is the establishment of a program called the Tourism Alley or well known as Lorong Wisata. In implementing the Tourism Alley program, the Makassar City government collaborated with the private sector. For this reason, it is necessary to carry out an analysis of collaboration in the implementation of the Tourism Alley program in Makassar City.

This study aims to find out how Collaborative Governance is implemented in the Tourism Alley Program in Makassar City. This study uses the Collaborative Governance theory by Ansell and Gash with indicators used namely Initial Conditions, Institutional Design, Facilitative Leadership, and Collaborative Processes. The method in this study uses a qualitative descriptive approach through the acquisition of primary data sourced from interviews and observations. The secondary data was obtained from the Makassar City Tourism Office.

The results of this study are said to be quite good, this is evidenced by the presence of several indicators that have not been maximized, namely the institutional design indicators can be said to have not been maximized because filling evidence of cooperation requires physical evidence and on the collaboration process indicators stakeholders need to increase joint commitment and pay attention to suggestions has been given from the alley-based community for the sustainability of the Tourism Alley program in Makassar City.

Keywords: Collaborative Governance, Tourism Alley



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A.TASYA AMELIA

NIM : E011191024

Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Collaborative Governance Dalam Program Lorong Wisata di Kota Makassar" adalah benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 30 Mei 2023

Yang menyatakan,



A. TASYA AMELIA



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

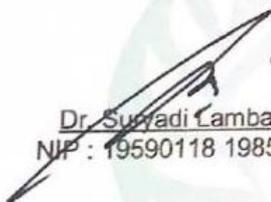
Nama : A.TASYA AMEILIA
NIM : E011191024
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Judul : COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM
LORONG WISATA DI KOTA MAKASSAR

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

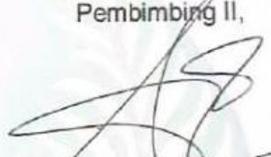
Makassar, 13 Juni 2023

Menyetujui,

Pembimbing I,


Dr. Suryadi Lambali, MA
NIP : 19590118 198503 1 006

Pembimbing II,


Amril Hans, S.AP., MPA
NIP : 19820706 202204 3 001

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Administrasi


Prof. Dr. Alwi, M.Si
NIP : 19631015 198903 1 006



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : A.TASYA AMEILIA
NIM : E011191024
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Judul : COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
PROGRAM LORONG WISATA DI KOTA
MAKASSAR

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 13 Juni 2023

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Suryadi Lambali, MA
Sekertaris : Amril Hans, S.AP., MPA
Anggota : 1. Drs. Nelman Edy, M.Si
2. Nuralamsyah Ismail, S.Sos., MA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala puji dan syukur terpanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, ridho, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Collaborative Governance Dalam Program Lorong Wisata di Kota Makassar**” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana S1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Tidak lupa pula shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan karunia ilmu pengetahuan yang tiada batasnya seperti saat ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, penulis sangat mengharapkan dan terbuka terhadap saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan karya ini kedepannya. Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, Andi Imelda Atjo dan Andi Achwal yang tidak henti-hentinya memberi dukungan baik moral maupun material kepada penulis. Ucapan terima kasih tidak lupa pula kepada adik-adik penulis Taufiq, Sultan dan Tenri yang menjadi teman dalam bersenda gurau dalam proses penyusunan skripsi ini.

Pembuatan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Dr. Phill. Sukri, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

3. **Dr. Hasniati, S.Sos, M.Si** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FISIP Universitas Hasanuddin.
4. **Prof. Dr. Alwi, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
5. **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, MAP** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
6. **Dr. Suryadi Lambali, MA** dan **Amril Hans, S.AP., MPA** selaku Pembimbing I dan selaku Pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktunya untuk memberi masukan, saran dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini.
7. **Drs. Nelman Edy, M.Si** dan **Nuralamsyah Ismail, S.Sos., MA** selaku Dewan Penguji dalam sidang proposal dan skripsi penulis. Terima Kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun dalam penyusunan skripsi ini.
8. **Seluruh Dosen Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin**, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan semoga ilmu yang diberikan dapat dimanfaatkan penulis sebaik mungkin.
9. **Seluruh Staf Departemen Ilmu Administrasi** (Ibu Rosmina, Pak Lili, Ibu Mantasia dan Pak Andi Revi), dan staf di lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan pelayanan yang telah diberikan selama penulis menjalani studi.
10. **Dinas Pariwisata Kota Makassar, PT. Catur Sentosa Adiprana Kota Makassar, Bapak/Ibu Lurah Tamamaung, Dewan Lorong Wisata, Bapak/Ibu RT** yang telah bersedia menjadi informan dan berbagi cerita kepada penulis dalam penelitian skripsi ini.
11. Terima kasih kepada **MIRACLE 2019** atas segala suka dan duka selama penulis menempuh status sebagai mahasiswa, semoga apa yang kita harapkan dapat tercapai dan sukses selalu.
12. Terima kasih kepada sahabat penulis, Marsyah Inayah dan Nur Difa yang telah menjadi teman penulis selama 10 tahun dan selalu mendukung penulis dan memberi tawa untuk penulis selama ini.

13. Terima kasih kepada teman-teman **VORECTIF 34**, Jauharah, Rifka, Rista, Risti, Aqiel, Ruhul, Giga, Andi, Fathur, Egi dan Gabriel yang menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi.
14. Terima kasih kepada teman-teman **RUMAH**, Naurah, Dira, Alviani, Resti, Besse, Magfirah, Sylvana, Adera, Yulia dan Alisa yang menemani penulis selama 4 tahun berkuliah di Universitas Hasanuddin dan menjadi semangat bagi penulis untuk melanjutkan perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi.
15. Terima kasih kepada teman-teman **ADM KOMSAT**, Yuyu, Kezia, Fathur, Wildan, Nayla dan Resti yang menyemangati penulis selama proses penyelesaian skripsi.
16. Terima kasih kepada **AIESEC in UNHAS** yang telah memberikan penulis berbagai pengalaman sehingga berhasil mengembangkan berbagai keterampilan dan skill yang dapat penulis manfaatkan di masa depan. Camie, Jamil, Dini, Naya, Sofi, Moyo, Nandiv, Nana, Kevin, Fuad, lis, Fey, Andra dan member AIESEC in UNHAS lainnya terima kasih karena telah memberi semangat untuk penulis selama ini.
17. Terima kasih kepada **SEVENTEEN**, Seungcheol, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, Dokyeom, Mingyu, Minghao, Seungkwon, Vernon, dan Dino atas karya musik yang selalu menemani dan menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi.
18. Terima kasih kepada teman-teman penulis Kak Uti, Kak Ocal, Kak Maura, Kak Nurul dan Chanto yang telah memberikan semangat untuk penulis dalam penyelesaian skripsi.
19. Terima kasih kepada teman-teman **EBS FM UNHAS** utamanya REKAMAN 2020, Fira, Anita, Rian, Wahyu, Furnarah, Ummul, Aulia, Rana, Sonya, Rosa, Namira, Fiska, Paisa, Andin dan Renia yang memberikan penulis semangat dalam penyelesaian skripsi.
20. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan dan doanya.

Makassar, 30 Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Konsep Administrasi Publik	7
1. Pengertian Administrasi	7
2. Pengertian Administrasi Publik	7
3. Ruang Lingkup Administrasi Publik	9
4. Paradigma Administrasi Publik	10
B. Konsep Good Governance	14
1. Pengertian Governance	14
2. Pengertian Good Governance	17
C. Konsep Collaborative Governance	19
1. Pengertian Kolaborasi	19
2. Manfaat Kolaborasi	22
3. Dimensi Kolaborasi	24
4. Pengertian Collaborative Governance	27
5. Model Collaborative Governance	28
D. Program Lorong Wisata	32
1. Konsep Program	32
2. Konsep Lorong Wisata	33
E. Penelitian Terdahulu	36

F. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Fokus Penelitian.....	42
D. Unit Analisis	44
E. Sumber Data	44
F. Informan	44
G. Teknik Pengumpulan Data	45
H. Teknik Analisis Data	46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum Kota Makassar	48
1. Kondisi Geografis	48
2. Kondisi Kependudukan	49
3. Visi dan Misi Kota Makassar	51
B. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kota Makassar	52
1. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kota Makassar	52
2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Makassar	55
C. Gambaran Umum PT. Catur Sentosa Adiprana	62
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Kondisi Awal	65
1. Awal Mula Kolaborasi	65
2. Ketidakseimbangan Sumber Daya.....	68
3. Kondisi Lorong Sebelum Melakukan Kolaborasi.....	69
4. Pembagian Keuntungan/Insentif	71
B. Desain Kelembagaan.....	74
1. Aturan Dasar.....	75
C. Kepemimpinan Fasilitatif.....	78
1. Melibatkan Peran Stakeholder	78
2. Komitmen	81
D. Proses Kolaborasi	85
1. Dialog Tatap Muka.....	85
2. Membangun Kepercayaan	87
3. Komitmen Terhadap Proses.....	91
4. Pemahaman Bersama.....	95
5. Hasil Sementara	98

BAB VI PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Collaborative Governance	29
Gambar 2.2 Kerangka Pikir	41
Gambar 4.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Makassar	49
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Makassar	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 4.1 Kondisi Kependudukan Kota Makassar	50
Tabel 5.1 Fakta Empiris Indikator Kondisi Awal	74
Tabel 5.2 Fakta Empiris Indikator Desain Kelembagaan.....	77
Tabel 5.3 Fakta Empiris Indikator Kepemimpinan Fasilitatif	83
Tabel 5.4 Fakta Empiris Indikator Proses Kolaborasi	103

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Makassar merupakan salah satu kota di Indonesia yang berkembang secara pesat yang dapat ditinjau dari pertumbuhan penduduk, dan pembangunan fasilitas seperti pusat belanja, pemukiman dan pembangunan spot wisata. Penduduk kota Makassar pada tahun 2021 mencapai 1.427.619 jiwa yang terdiri dari 711.006 jiwa laki-laki dan 716.613 jiwa perempuan. Sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Pemerintah kota Makassar setiap tahun berupaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di perkotaan. Walikota Makassar periode tahun 2021-2024 telah menciptakan berbagai program untuk berbagai permasalahan yang ada di kota Makassar yang dimana untuk penataan simpang jalan dibuatlah program “Smart Panyingkulu” dan berbagai program lainnya. Dalam menciptakan kota bersih, aman, nyaman, terampil dan sejahtera hingga saat ini Walikota Makassar telah memperkenalkan Koridor Hijau. Dalam mewujudkan penghijauan kota Makassar, walikota Makassar membuat program Lorong Garden dimana pada program ini pemerintah kota Makassar mengembangkan penanaman tanaman hias, sayuran dan hortikultura lainnya. Kepedulian pemerintah kota Makassar terhadap kemajuan lorong di kota Makassar dengan adanya Lorong Sehat dan Lorong Garden membuat kota Makassar mendapatkan penghargaan seperti salah satunya penghargaan dari Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) pada tahun 2022 serta penghargaan lainnya.

Dengan potensi lorong yang terus menerus meningkat, sejak akhir

tahun 2021 Walikota Makassar membuat program Lorong Wisata (LONGWIS) sebagai program dalam penanggulangan dampak ekonomi dan pariwisata setelah COVID-19. Program Lorong Wisata menjadi program unggulan pemerintah kota Makassar tak hanya dalam penanggulangan masalah sampah akan tetapi menjadi solusi dalam menarik wisatawan dengan partisipasi masyarakat dan juga perangkat daerah.

Pemerintah Kota Makassar membuat program Lorong Wisata dengan tujuan melakukan pemetaan dan klasterisasi potensi lorong berbasis teknologi informasi berdasarkan potensi lorong terkait dengan potensi SDM, potensi fisik lingkungan dan pengembangan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah kota Makassar menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk mengembangkan ekonomi lorong berdasarkan potensi yang dimiliki. Potensi yang dimiliki lorong pun beragam seperti pengembangan usaha dan kawasan kuliner, pembinaan dan pengembangan budaya & seni, peningkatan budidaya tanaman, pembinaan pendidikan, serta berbagai potensi lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lorong yang ada di kota Makassar.

Dalam pengembangan program Lorong Wisata oleh pemerintah kota Makassar dibutuhkan hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah, sektor swasta dan juga masyarakat dalam mewujudkan Good Governance. Pemerintah dalam hal ini menjadi fasilitator dan memiliki peran serta fungsinya dalam membuat dan menentukan seluruh kebijakan atau program demi kebersihan serta keindahan lingkungan setempat yang dapat menarik wisatawan. Di tahun pertama Lorong Wisata dicanangkan oleh pemerintah kota Makassar diberlakukan target yaitu 7 lorong pada masing-masing kelurahan sehingga pada tahun 2022 telah terbentuk lebih dari 1.000

Lorong Wisata yang tersebar di seluruh wilayah kota Makassar dari target 5.000 Lorong Wisata selama periode Walikota 2021-2024 berlangsung dengan bantuan dari masyarakat setempat, NGO dan juga kerjasama dengan pihak swasta.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai kolaborasi yaitu kolaborasi antara para pelaku seperti masyarakat dan pihak swasta dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Undang-undang Pemerintah Daerah telah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah harus turut serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan daerah yang terbagi dalam berbagai kegiatan dalam hal ini mewujudkan program Lorong Wisata milik pemerintah kota Makassar.

Kolaborasi saat ini menjadi bagian penting dari sektor publik karena dengan kolaborasi masing-masing stakeholder dapat duduk bersama dalam satu forum, membangun kesepahaman dan komitmen serta merasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) dalam kelangsungan pembangunan. Kolaborasi antar stakeholder tersebut merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Konsep kolaborasi adalah hasil dari aspek penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini telah berlangsung dan merupakan tindakan yang tepat saat diperlukan komunikasi dan peran antar aktor yang saling berhubungan dan memberikan keuntungan.

Kolaborasi menjadi proses dimana aktor yang memiliki wewenang otonom berinteraksi melalui negosiasi formal dan informal, bersama-sama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan dan cara bertindak atau memberikan keputusan atas isu-isu yang membawa mereka dalam

keharusan kebersamaan. Hal ini merupakan interaksi yang saling menguntungkan. Konsep kolaborasi ini kemudian berkembang hingga konsep kolaborasi antara pemerintah dan pihak lainnya yang sering disebut sebagai *collaborative governance*.

Konsep *collaborative governance* didefinisikan sebagai susunan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan stakeholder non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus dan deliberatif, yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola kebijakan program atau mengelola suatu aset. Dengan hadirnya konsep *collaborative governance* maka diharapkan akan terjadi kerjasama yang baik antara pemerintah maupun *stakeholder* non pemerintah. Akan tetapi, dalam melaksanakan kolaborasi tentunya perlu melalui beberapa tahap ataupun proses agar para pihak setuju untuk melakukan kolaborasi yang pasti membuat pihak non-pemerintah maupun pemerintah mempertimbangkan banyak hal seperti dampak dari kolaborasi, manfaat kolaborasi untuk kedua pihak dan kapan saja para pihak perlu terlibat.

Proses kolaborasi dalam program Lorong Wisata antara pemerintah kota Makassar dan pihak non-pemerintah dapat membantu keberlangsungan program utamanya dalam hal sumber daya. Hal ini telah dilakukan pemerintah kota Makassar melalui kerjasama dalam program Lorong Wisata dengan salah satu pihak swasta (Gojek) saat pembentukan Lorong Wisata pertama kali pada tahun 2021. Dalam pembentukan Lorong Wisata, pemerintah kota Makassar menghimbau agar setiap Lorong memiliki daya tarik dalam hal kuliner, budidaya tanaman/ikan, kerajinan tangan serta ciri khas seperti mural dan spot foto bagi

pengunjung lorong. Namun, tidak semua lorong wisata aktif dalam mengembangkan semua potensi lorong yang dimiliki. Beberapa hanya mengembangkan potensi kuliner dan beberapa hanya mengembangkan potensi kerajinan. Hal ini dipengaruhi dengan bagaimana proses kolaborasi yang terjadi di dalam sebuah lorong, apakah kolaborasi berjalan dengan baik ataupun ada hal yang menghambat terjadinya kolaborasi sehingga hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **Collaborative Governance Dalam Program Lorong Wisata di Kota Makassar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ditetapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan program lorong wisata di kota Makassar ditinjau dalam *collaborative governance*?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *collaborative governance* dalam program lorong wisata di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berikut ini:

1. Akademis

Penelitian ini merupakan aktualisasi dari salah satu Tri Dharma perguruan tinggi yaitu penelitian sekaligus menjadi sarana dalam mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan

di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

2. Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pemerintah maupun perangkat daerah di Kota Makassar dalam berkolaborasi dengan para *stakeholder* untuk mewujudkan program Lorong Wisata.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Menurut The Liang Gie (1999: 14) administrasi adalah “Segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.”

Sementara itu, menurut Nawawi (1999:1), administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Menurut Siagian (2002: 2) administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Pengertian Administrasi Publik

Kata administrasi publik adalah terjemahan dari bahasa Inggris “public administration” yang sering disebut sebagai administrasi negara atau administrasi pemerintahan, Indradi (2006:110). Menurut Chandler (1998) dalam Indradi (2006:114) dijelaskan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk

memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan keputusan yang ada di dalam kebijakan publik. Sedangkan menurut Barton dan Chapel dalam Indradi (2006:116) menjelaskan bahwa administrasi publik sebagai “the work of Government”. Menurut Starling dalam Indradi (2006:116), menjelaskan bahwa administrasi publik adalah semua yang dicapai pemerintah yaitu dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagaimana dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan.

Menurut Rosenbloom dalam Indradi (2006:116), menjelaskan administrasi publik yaitu “is the use of managerial, legal and political”. Merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. Berdasarkan beberapa penjelasan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik adalah proses kerjasama untuk memformulasikan dan menjalankan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan, baik untuk kepentingan pemerintah maupun kepentingan publik. Menurut Chander dan Plano dalam Keban (2004: 3) mengemukakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam publik. Sementara itu, Henry dalam Harbani Pasolong (2008: 8), mengemukakan bahwa: “Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan

sosial.” Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Sedangkan Waldo dalam Pasolong (2008: 8) mendefinisikan Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pengertian tentang administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik.

3. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Pembahasan ruang lingkup administrasi publik, akan dijadikan sebagai ruang lingkup penelitian administrasi publik. Menurut Nicholas Henry (1995) dalam Pasolong (2012:64), dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri, antara lain:

- a. Organisasi publik pada prinsipnya berkaitan dengan model-model organisasi, dan perilaku birokrasi
- b. Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia.
- c. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

Menurut Dimock & Dimock (1992) dalam Pasolong (2012:64) menjelaskan bahwa ruang lingkup administrasi publik terbagi menjadi empat komponen, yaitu:

- a. Apa yang dilakukan pemerintah: pengaruh kebijakan dan tindakan

tindakan politis, dasar-dasar, wewenang, lingkungan kerja pemerintah, penentuan tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan administratif yang bersifat ke dalam, dan rencana-rencana.

- b. Bagaimana pemerintah mengatur organisasi, personalia, dan pembiayaan usaha-usahanya, struktur administrasi dari segi formalnya.
- c. Bagaimana para administrator mewujudkan kerjasama (teamwork). Aliran dan proses administrasi dalam pelaksanaan, dengan titik berat pada pemimpin, tuntutan, koordinasi, pelimpahan wewenang, hubungan pusat dengan bagian-bagian pengawasan, moril, hubungan masyarakat dan sebagainya.
- d. Bagaimana pemerintah tetap bertanggung jawab, baik mengenai pengawasan dalam badan-badan eksekutif sendiri, dan yang lebih penting lagi mengenai pengawasan oleh badan-badan eksekutif sendiri, dan yang paling penting lagi mengenai pengawasan oleh badan-badan perwakilan rakyat, badan-badan yudikatif dan berbagai badan lainnya.

Berdasarkan uraian tentang ruang lingkup administrasi publik, maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup administrasi publik adalah cakupan administrasi negara yang bergantung pada perkembangan kebutuhan dan masalah yang ada di masyarakat. Ruang lingkup atau cakupan administrasi negara sangat kompleks. Dengan adanya ruang lingkup administrasi, maka akan mempermudah dalam proses pelaksanaan Administrasi Publik.

4. Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan administrasi sebagai disiplin ilmu mengalami beberapa proses pergantian cara pandang, dimana pemahamannya dilihat dari paradigma. Perkembangan paradigma tersebut menggambarkan adanya perubahan-

perubahan dan perbedaan-perbedaan dalam tujuan, teori dan metodologi serta nilai-nilai yang mendasari. Henry (1988) mengemukakan lima paradigma administrasi publik, yaitu

1) Paradigma Dikotomi Antara Politik dan Administrasi

Terdapat dua fungsi pokok pemerintah yaitu politik dan administrasi. Maka permasalahannya adalah dimana administrasi Negara berada, sehingga dibedakan dengan jelas antara administrasi dan politik. Namun, administrasi Negara sebenarnya harus berada pada birokrasi pemerintahan.

2) Prinsip-prinsip Administrasi Negara

Dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya. Maka prinsipnya adalah administrasi Negara dapat diterapkan dimana saja walaupun berbeda kebudayaan, lingkungan, visi dan lainnya.

3) Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik

Merupakan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi Negara dan ilmu politik. Dan pada fase ini administrasi Negara telah berkembang sebagai bagian dari ilmu politik.

4) Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi

Perkembangannya diawali ketidaksenangan bahwa ilmu administrasi dianggap sebagai ilmu kelas dua setelah ilmu politik. Usaha pengembangannya bertujuan untuk mempercepat proses mencari alternatif paradigma ilmu administrasi.

5) Administrasi Negara Sebagai Administrasi Negara

Pada proses ini administrasi Negara telah merambah ke teori organisasi,

ilmu kebijakan dan ekonomi politik. (Pasolong, 2012: 36-38).

Sedangkan Frederickson (1984), mengemukakan enam paradigma administrasi publik, yaitu:

1) Birokrasi Klasik

Fokusnya adalah struktur organisasi dan fungsi prinsip-prinsip manajemen sedangkan yang menjadi lokusnya adalah berbagai jenis organisasi baik pemerintahan maupun bisnis.

2) Birokrasi Neo Klasik

Fokusnya adalah proses pengambilan keputusan dengan perhatian khusus kepada penerapan ilmu perilaku, ilmu manajemen, analisa sistem, dan penelitian operasi. Sedangkan lokusnya adalah keputusan yang dihasilkan oleh birokrasi pemerintahan.

3) Kelembagaan

Fokusnya adalah perilaku birokrasi yang dipandang sebagai suatu organisasi yang kompleks. Sedangkan masalah-masalah efisiensi, efektivitas dan produktivitas kurang dapat perhatian. Perilaku dalam paradigma ini adalah perilaku pengambilan keputusan yang bersifat gradual dan incremental, dimana hal ini dipandang sebagai satu-satunya cara untuk memadukan kemampuan dan keahlian birokrasi dengan preferensi kebijakan dan berbagai kemungkinan bisa dari pejabat-pejabat politis.

4) Hubungan Kemanusiaan

Yang mendasari paradigma ini adalah keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, minimasi perbedaan dan status dan hubungan antar pribadi, keterbukaan, aktualisasi diri dan optimasi tingkat kepuasan. Focus dari

paradigma ini adalah dimensi-dimensi kemanusiaan dan aspek sosial dalam tiap jenis organisasi ataupun birokrasi.

5) Pilihan Publik

Fokus dari paradigma ini tak lepas dari politik, yaitu pilihan-pilihan untuk melayani kepentingan publik akan barang dan jasa yang harus diberikan oleh sejumlah organisasi yang kompleks.

6) Administrasi Negara Baru

Fokus dari paradigma ini meliputi usaha mengorganisasikan, menggambarkan, mendesain, ataupun membuat organisasi dapat berjalan kearah dan dengan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal yang dilaksanakan dengan menggambarkan sistem desentralisasi dan organisasi-organisasi demokratis yang responsive dan mengundang partisipasi serta dapat memberikan secara merata jasa-jasa yang diperlukan masyarakat. (Pasolong, 2012: 38-40)

Pada tahun 1992 muncul paradigma administrasi publik yang bersifat reformatif yaitu *reinventing government*. Paradigma ini dicetuskan oleh Osborne dan Gaebler (1992) kemudian dioperasionalkan Osborne dan Plastrik (1997). Paradigma *Reinventing Government* dikenal juga *New Public Management* (NPM). Paradigma ini menjadi populer sebagai prinsip *good governance*. Dalam paradigma ini diungkapkan bahwa ada tujuh prinsip dalam NPM, yaitu:

1. Pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik
2. Penggunaan indikator kinerja
3. Penekanan yang lebih besar pada control output
4. Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi
5. Pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil

6. Penekanan gaya sektor swasta pada penerapan manajemen
7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya. (Pasolong, 2012: 42-44)

B. Konsep Good Governance

1. Pengertian Governance

Governance berasal dari kata "govern" dengan definisi yakni mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah masalah kolektif masyarakat. Dengan demikian secara luas, governance termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk lebih jelasnya dalam memahami pergeseran makna antara government dan governance, Leach dan Percy Smith dalam Sumarto (2003) mengungkapkan perbedaan terkait dua konsep bahwa government mengandung pengertian politisi dan pemerintah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan dan sementara sisa dari elemen sebuah negara itu bersifat pasif. Sementara governance meleburkan makna tersebut, dengan merenggangkan kekakuan antara pemerintah dan yang diperintah (bagian negara yang pasif), sehingga bagian yang pasif tersebut memiliki peranan dan andil dari bagian government. Berdasarkan perbedaan antara konsep government dan governance di atas, dapat dinyatakan bahwa konsep government secara makna atau pengertian lebih mengacu atau mengarah kepada politisi atau lembaga pemerintah. Government mengarah kepada lembaga pemerintah atau birokrasi itu sendiri yang bertugas memberikan pelayan kepada masyarakat. Selain itu, pada government masyarakat hanya bersikap pasif atau hanya semata-mata sebagai pihak yang menerima pelayanan

begitu saja. Berbeda dengan government, governance disebutkan lebih lunak, dalam artian tidak hanya lembaga pemerintahan/birokrasi yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi juga memberikan ruang dan andil dari masyarakat dan pihak lain non-pemerintah.

Konsep governance menurut Stoker (1998:17-18) merujuk kepada pengembangan dari gaya memerintah dimana batas-batas antara dan diantara sektor publik dan sektor privat menjadi kabur (Ewalt, 2001:8). Pengaburan batas-batas ini sejalan dengan kebutuhan dari negara modern untuk lebih melibatkan mekanisme politik dan pengakuan akan pentingnya isu-isu menyangkut empati dan perasaan dari publik untuk terlibat sehingga memberikan kesempatan bagi adanya mobilisasi baik secara sosial maupun politik (Stoker, 2004:10). Hal ini yang kemudian membuat partisipasi melalui pembangunan jejaring antara pemerintah dan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting bagi keberlanjutan sebuah legitimasi kebijakan (Stoker, 2004:10). Konsep governance ini kemudian berkembang menjadi good governance seperti yang kita kenal sekarang dalam rangka membedakan implementasinya antara yang “baik” (good) dengan yang “buruk” (bad) (Prasojo, 2003:39). Good governance menurut Plumptre and Graham (1999:12), merupakan model dari governance yang mengarahkan kepada hasil ekonomi dan sosial sebagaimana dicari oleh masyarakat.

Governance dalam konteks administrasi publik adalah merupakan proses perumusan dan implementasi untuk mencapai tujuan-tujuan publik yang dilakukan oleh aktor: pluralitas organisasi, dengan sifat hubungan yang lebih luwes dalam tataran vertikal dan horizontal, disemangati oleh nilai-nilai kepublikan antara lain keabsahan, responsif dan kreatif. Pada hakikatnya,

penyelenggaraan pemerintahan ditujukan kepada optimalnya fungsi pelayanan publik melalui praktek administrasi yang efektif. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dikembangkan dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang tidak hanya melibatkan pemerintah atau negara semata, tetapi juga harus bisa ditunjukkan dengan praktek administrasi publik yang baik (Natalia, 2022). Stoker (1998:18) mengemukakan 5 (lima) proposisi mengenai governance sebagai berikut (Ewalt, 2001:9-11):

- 1) Governance merujuk kepada institusi dan aktor yang tidak hanya pemerintah
- 2) Governance mengidentifikasi kaburnya batas-batas dan tanggung jawab dalam mengatasi isu sosial dan ekonomi
- 3) Governance mengidentifikasi adanya ketergantungan dalam hubungan antara institusi yang terlibat dalam aksi kolektif
- 4) Governance adalah mengenai self-governing yang otonom dari aktor-aktor
- 5) Governance menyadari untuk memperbaiki sesuatu tidak perlu bergantung kepada kekuasaan pemerintah melalui perintah dan kewenangannya

Governance melibatkan tidak hanya negara (pemerintah) tetapi juga sektor privat dan masyarakat. Semuanya merupakan aktor yang memiliki peran sama penting dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan. Negara (pemerintah) berperan dalam menciptakan situasi politik dan hukum yang kondusif; sektor privat berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan; dan masyarakat madani berperan dalam memfasilitasi interaksi secara sosial dan politik yang memadai bagi mobilisasi individu atau kelompok-kelompok

masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas, ekonomi, politik dan sosial (Tamin, 2002:18). Dengan kata lain menurut Salomo (2002:52-53), birokrasi dituntut agar mempunyai karakter bersih, terbuka, akuntabel responsif, berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat bagi keterlibatan dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan kontrol kebijakan; dunia usaha dituntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, moralitas tinggi, social responsibility dan patuh pada perundang-undangan yang berlaku serta; masyarakat dituntut agar kuat, selalu menyatakan pendapatnya, berkualitas tinggi serta partisipatif terhadap berbagai proses yang dilakukan baik oleh birokrasi maupun oleh dunia usaha. Setiap aktor tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan masing masing. Karenanya melalui good governance diharapkan terciptanya interaksi yang konstruktif dan memadai di antara para aktor tersebut.

2. Pengertian Good Governance

Pengertian dari good governance dapat dilihat dari pemahaman yang dimiliki baik oleh IMF maupun World Bank yang melihat Good Governance sebagai sebuah cara untuk memperkuat “kerangka kerja konstitusional dari pemerintah” (Bappenas, 2002:39). Hal ini menurut mereka berarti bagaimana memperkuat aturan hukum dan prediktabilitas serta imparsialitas dari penegakannya (Bappenas, 2002:39). Ini juga berarti mencabut akar dari korupsi dan aktivitas-aktivitas rent seeking, yang dapat dilakukan melalui transparansi dan aliran informasi serta menjamin bahwa informasi mengenai kebijakan dan kinerja dari institusi pemerintah dikumpulkan dan diberikan kepada masyarakat secara memadai sehingga masyarakat dapat memonitor dan mengawasi manajemen dari dana yang berasal dari masyarakat (Bappenas, 2002:9- 10). Pengertian ini

sejalan dengan pendapat Bovaird and Loffler (2003:10) yang mengatakan bahwa good governance mengusung sejumlah isu seperti: keterlibatan stakeholder; transparansi; agenda kesetaraan (gender, etnik, usia, agama, dan lainnya); etika dan perilaku jujur; akuntabilitas; serta keberlanjutan.

Berdasarkan pengertian diatas, good governance memiliki sejumlah ciri sebagai berikut (Bappenas, 2002:8-19):

- a. Akuntabel, artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus disertai pertanggungjawabannya;
- b. Transparan, artinya harus tersedia informasi yang memadai kepada masyarakat terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan;
- c. Responsif, artinya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus mampu melayani semua stakeholder;
- d. Setara dan inklusif, artinya seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali harus memperoleh kesempatan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan sebuah kebijakan;
- e. Efektif dan efisien, artinya kebijakan dibuat dan dilaksanakan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia dengan cara yang terbaik;
- f. Mengikuti aturan hukum, artinya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan membutuhkan kerangka hukum yang adil dan ditegakan;
- g. Partisipatif, artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus membuka ruang bagi keterlibatan banyak aktor;
- h. Berorientasi pada konsensus (kesepakatan), artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama

diantara para aktor yang terlibat.

Good governance merupakan hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab serta visi strategik. Good governance dimaknai sebagai praktek penerapan kewenangan penerapan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan (UNDP, 1997). Selain itu, konsep governance adalah keterlibatan aktor-aktor di luar pemerintah yang merespon masalah publik. Praktik governance ini, bertujuan dalam rangka menyediakan pelayanan publik dengan melibatkan aktor dari unsur masyarakat (Dwiyanto, 2021).

C. Konsep Collaborative Governance

1. Pengertian Kolaborasi

Secara etimologi, collaborative berasal dari kata *co* dan *labor* yang mengandung makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, kata kolaborasi sering kali digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian pekerjaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan (O'Leary, 2010), ataupun lintas organisasi bahkan lintas negara sekalipun. Adapun secara terminologi kolaborasi mengandung makna yang sangat umum dan luas yang mendeskripsikan adanya situasi tentang terjadinya kerja sama antara dua orang ataupun institusi atau lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu memecahkan permasalahan masing-

masing secara bersama-sama pula.

Secara umum, kolaborasi adalah adanya pola dan bentuk hubungan yang dilakukan antar individu ataupun organisasi yang berkeinginan untuk saling berbagi, saling berpartisipasi secara penuh, dan saling menyetujui atau bersepakat untuk melakukan tindakan bersama dengan cara berbagi informasi, berbagi sumber daya, berbagi manfaat, dan berbagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menggapai sebuah cita-cita untuk mencapai tujuan bersama ataupun untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh mereka yang berkolaborasi. Betapa pengertian tersebut sejalan dengan definisi yang dibangun oleh Roschelle dan Teasley yang mengatakan bahwa *collaboration more specifically as "mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together"* dalam Lai (2011:4). Selanjutnya, Roschelle dan Teasley menjelaskan bahwa *collaborative interactions are characterized by shared goals, symmetry of structure, and a high degree of negotiation, interaction, and interdependence*. Begitu pula dengan Camarihna-Matos dan Afsarmanesh (2008) dengan nada yang hampir sama mengatakan bahwa kolaborasi merupakan sebuah proses ketika beberapa entitas atau kelompok saling berbagi informasi, sumber daya, dan tanggung jawab atas sebuah program kegiatan yang dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Healey (1996: 208), kolaborasi memerlukan strategi melalui tiga modal, yakni modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, komunikasi, dan kemauan bertukar pikiran; modal intelektual yang terdiri dari pemahaman; dan modal politik yang terdiri dari perjanjian dan proyek formal maupun informal.

Pada umumnya, kolaborasi itu dibentuk berdasarkan prakondisi atau keadaan tertentu. Sehubungan dengan hal ini, para calon anggota kolaborasi harus memiliki kesamaan persepsi dan deskripsi lengkap tentang prakondisi masing masing anggota kolaborasi ataupun prakondisi sebuah kolaborasi yang akan dibentuknya. Selanjutnya, gambaran tentang prakondisi tersebut harus digunakan sebagai titik awal penyelenggaraan kolaborasi. Menurut pandangan Brna (1998) dan Giesen (2002), deskripsi lengkap tentang prakondisi tersebut meliputi hal berikut.

- a. Adanya konsensus/kesepakatan bersama untuk berkolaborasi yang berimplikasi terhadap perlunya saling berbagi tentang sesuatu (*parties mutually agree to collaborate, which implies accepting to share*).
- b. Masing-masing kelompok harus bisa saling menerima manfaat atas model dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota (*parties keep a model of each other's capabilities*).
- c. Masing-masing kelompok saling menerima atas visi dan tujuan yang disepakati selama proses kolaborasi berlangsung demi tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama (*parties share a goal and keep some common vision during the collaboration process towards the achievement of the common goal*).
- d. Masing-masing kelompok harus saling berbagi pemahaman atas berbagai persoalan yang dihadapi, yang berimplikasi terhadap terciptanya diskusi atas dasar sikap sukarela dari masing-masing pihak (*parties maintain a shared understanding of the problem at hand, which implies discussing the state of their progress (state awareness of each other)*).

2. Manfaat Kolaborasi

Nawawi (1984) menjelaskan bahwa kolaborasi merupakan upaya sadar dalam mencapai tujuan bersama yang telah mereka tetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan. Pembagian kerja tersebut bukanlah sebagai bentuk pembagian kerja, tetapi masih harus dinilai sebagai satu kesatuan kerja yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan bersama. Sementara itu pada sisi yang lain, pembentukan kolaborasi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan atas pelaksanaan suatu pekerjaan yang besar, beban pendanaan yang besar, penyediaan aset kerja, ataupun untuk penanggulangan berbagai permasalahan yang berat dan rumit yang tidak mungkin dapat dikerjakan secara individual tanpa ada partisipasi dan campur tangan dari pihak lain. Selain kolaborasi sebagai aspek penting untuk dilakukan oleh para kolaborator, kolaborasi juga memiliki beberapa keuntungan atau manfaat bagi para kolaborator dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan secara kolaboratif dalam sebuah organisasi. Beberapa keuntungan atau manfaat yang dimaksud posisinya bertautan dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Pooling of talent and strengths

Didirikannya kolaborasi sangat bermanfaat dalam menghimpun berbagai talenta dan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing anggota kolaborasi. Oleh sebab itu, ketika para anggota tim kolaborasi sanggup memanfaatkan pengetahuan, pengalaman, dan keahlian serta keunggulan talenta lain yang dimiliki oleh masing-masing anggota tim, semua hal tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal dalam kehidupan berkolaborasi. Sudah barang tentu pemanfaatan berbagai talenta tersebut harus dikelola secara

baik oleh pimpinan kolaborasi dengan cara melakukan pelibatan semua anggota secara efektif agar masing-masing anggota bersedia untuk mencurahkan segenap kemampuan mereka dalam mencapai tujuan bersama. Misalnya, ketika salah satu anggota kolaborasi sedang berjuang untuk mendemonstrasikan keahliannya, yang secara bersamaan ia harus menunjukkan kemampuan aspek teknisnya dalam menanggulangi terjadinya permasalahan, ia harus didukung oleh anggota kolaborasi lainnya. Dalam hal ini, terciptanya efektivitas atas penyelenggaraan kolaborasi dapat dilihat ketika para anggota lainnya bisa menyaksikan, mengambil manfaat, dan mempraktikkan hal yang sama serta memberikan dukungan secara material maupun immaterial sehingga mereka dapat mencari solusi dari setiap permasalahan yang timbul dan mendapatkan hasil yang optimal. Hal yang semacam inilah yang dapat meningkatkan mereka dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas capaian dengan cara yang lebih cepat.

2) *Development of employee skills*

Pada dasarnya, penyelenggaraan kolaborasi memang saling memberi manfaat antarmereka yang berkolaborasi dalam sebuah organisasi. Ketika mereka bekerja sama secara kolaboratif, baik secara langsung maupun tidak langsung, hal itu akan dapat membangun atau meningkatkan keahlian mereka secara keseluruhan. Dalam hal yang sedemikian ini, mereka saling berinteraksi, saling berbagi ide, dan saling bertukar pengalaman sehingga mereka menjadi semakin tahu dan mengerti bagaimana cara bekerja sama yang baik, berpikir bersama secara positif, serta bernegosiasi secara adil dan mengoperasikan alat tertentu secara baik dan benar. Mereka

saling berbagi dan saling memberi pengalaman mereka masing-masing yang berdampak pada terjadinya peningkatan kualitas kerja mereka, baik terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap kolega mereka, sehingga posisi mereka menjadi semakin kuat. Pada saat itulah, mereka mulai mendapatkan ilmu baru, cara kerja baru, dan pengalaman baru bahkan perspektif baru yang sangat berguna bagi mereka untuk menciptakan improvisasi kerja yang baru, yang berdampak secara positif dalam mencapai cita-cita baru, ataupun dalam mencapai tujuan bersama yang telah mereka sepakati bersama.

3) *Speeds up solution*

Betapa penyelenggaraan kolaborasi dapat mempercepat penanggulangan masalah secara cepat, tepat, dan tuntas. Bahkan, dapat dikatakan bahwa kolaborasi dapat menghasilkan progress kerja yang lebih cepat. Apabila terdapat sebuah masalah 'tertentu', mungkin masalah itu baru bisa diatasi sekitar dua atau tiga bulan karena permasalahan tersebut ditangani oleh satu orang atau satu pihak saja. Namun, apabila permasalahan tersebut ditanggulangi secara bersama-sama oleh banyak pihak yang benar-benar kredibel dan ahli di bidangnya, tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan tersebut akan dapat ditanggulangi dalam kurun waktu yang lebih cepat.

3. Dimensi Kolaborasi

Thomson dan Perry dalam tulisannya yang berjudul "Collaboration Processes: Inside The Black Box" berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) kunci dimensi kolaborasi (Thomas dan Perry, 2006: 24-28), yaitu sebagai berikut

1) Dimensi Tata Pemerintahan (The Process of Collaborative Governing: The

Governance Dimension)

Dimensi pemerintahan berkaitan dengan pengambilan keputusan bersama (joint decision making), pengaturan pembagian daya, dan pemecahan masalah. Pada dimensi pemerintahan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut: (1) struktur hirarki dan otoritas tidak mendominasi; (2) kesadaran bahwa pihak yang berkolaborasi tidak hanya secara langsung bertanggung jawab untuk mencapai kesepakatan tetapi juga harus memaksakan keputusan pada diri mereka sendiri; (3) ketersediaan untuk menerima bahwa semua pihak yang berkolaborasi memiliki kepentingan yang sah sehingga hasilnya mencerminkan konsensus kelompok, bukan kekuatan koalisi atau kekuatan politik; dan (4) pemahaman bahwa pemerintahan harus menekankan keterbukaan informasi, menghormati pendapat orang lain, dan melalui negosiasi yang panjang dalam mencapai kesepakatan.

2) Dimensi Administrasi (The Process of Collaborative: The Administration Dimension)

Dimensi administrasi dalam kolaborasi sangat penting dalam keberlangsungan hubungan pihak-pihak yang berkolaborasi. Struktur administrasi dalam kolaborasi memiliki posisi sentral untuk koordinasi komunikasi, pengorganisasian dan penyebaran informasi, serta mengupayakan pihak-pihak yang berkolaborasi untuk bersama-sama mengatur hubungan mereka, dimana Freitag dan Winkler menyebutnya sebagai "sosial koordinasi". Indikator dalam dimensi administrasi adalah kejelasan peran dan tanggung jawab setiap aktor, pertemuan kerja sama yang efektif, kejelasan tujuan, tugas-tugas terkoordinasi dengan baik,

terdapat saluran komunikasi yang formal, dan pemantauan dalam pelaksanaan kolaborasi (Thomson, Perry, and Miller, 2008: 104).

3) Dimensi Otonomi (The Process of Reconciling Individual and Collective Interest: The Autonomy Dimension)

Dimensi otonomi memiliki hubungan yang kontras antara kontrol bersama dan kontrol individu (Wood dan Grey, 1991). Dalam sebuah kolaborasi, aktor yang terlibat melindungi identitas mereka dengan mempertahankan kontrol individu. Di sisi lain, kontrol bersama melibatkan ketersediaan mitra untuk berbagi informasi, bukan hanya tentang operasi organisasi mereka sendiri, tetapi juga tentang apa yang mereka bisa dan tidak bisa dalam berkolaborasi. Dimensi otonomi mencoba untuk menangkap ketegangan yang implisit antara kepentingan aktor dan kepentingan bersama. Indikator dimensi otonomi ini berkaitan dengan sejauh mana aktor melihat kolaborasi sebagai penghalang misi organisasi, kepercayaan bahwa keuntungan mereka dipengaruhi oleh kolaborasi, dan kesadaran aktor untuk berusaha memenuhi harapan organisasi dan harapan aktor lain dalam kolaborasi.

4) Dimensi Mutualitas (The Process of Forging Mutually Beneficial Relationship: The Mutuality Dimension)

Dimensi mutualisme berakar pada saling ketergantungan. Sebuah organisasi harus mengalami saling ketergantungan baik dalam kesamaan kepentingan maupun perbedaan kepentingan, yang kemudian disebut Powell (1990) sebagai "complementarities". Komplementaritas menjelaskan situasi dimana suatu organisasi mengorbankan haknya untuk mendapatkan daya dari organisasi lain demi mencapai kepentingan mereka sendiri. Dalam kolaborasi, adanya saling ketergantungan merupakan kunci yang

penting agar hubungan antar aktor terus terjalin dengan baik.

5) Proses Membangun Norma Sosial: Kepercayaan dan Dimensi Timbal Balik
(The Process of Building Social Capital Norms: The Trust and Reciprocity Dimension)

Dalam kolaborasi, aktor individu akan menunjukkan kesediaan untuk berinteraksi dalam kolaborasi jika aktor yang lain juga menunjukkan kesediaan yang sama. Hubungan timbal balik tersebut akan membentuk kepercayaan antar pihak-pihak yang berkolaborasi jika dilakukan secara berulang-ulang. Adanya kepercayaan antar pihak-pihak yang berkolaborasi memberikan manfaat terhadap kelangsungan kolaborasi, yakni: (1) membuat itikad baik, pihak-pihak yang berkolaborasi akan berperilaku sesuai komitmen eksplisit dan implisit; (2) jujur dalam negosiasi apapun; (3) pihak-pihak yang berkolaborasi tidak akan mengambil keuntungan yang lebih meskipun terdapat kesempatan (Cummins dan Bromley, 1993: 303).

4. Pengertian Collaborative Governance

Ansell dan Gash (2007) mengembangkan kerangka konsep kolaborasi dengan pendekatan berbasis sistem yang kemudian menemukan konsep “collaborative governance” (kolaborasi pemerintahan) yang didefinisikan sebagai berikut

“a governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public or manage public programs or assets” (Ansell dan Gash, 2007:544).

Collaborative Governance berdasarkan kutipan di atas dapat diartikan sebagai susunan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung

terlibat dengan stakeholder non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus dan deliberatif, yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola kebijakan program atau mengelola suatu aset.

Adapun pendapat dari Emerson et al. (2012) yang menghilangkan penekanan pada pemerintah sebagai penggerak kolaborasi dan menggambarkan “rezim pemerintahan kolaboratif (collaborative governance regime)” sebagai

“Process and structures of public policy decision making and management that engage people constructively across the boundaries of public agencies, levels of government, and/or the public, private and civic spheres in order to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished” (dalam Morris et al., 2015: 19).

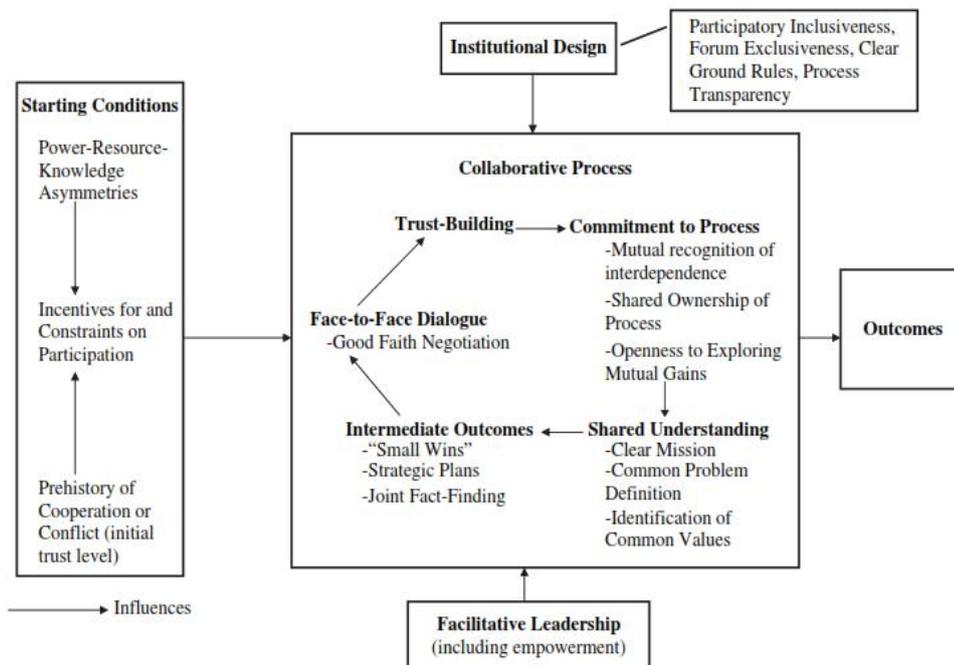
Proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan orang-orang secara konstruktif melintasi batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan/atau sektor umum, pribadi dan sipil untuk mewujudkan tujuan umum yang akan dicapai. Konsep rezim pemerintahan kolaboratif ini diperkuat oleh proses kolaborasi yang berulang-ulang dimana prinsip keterlibatan (komunikasi), berbagi motivasi (kepercayaan, komitmen, dan mutualitas), dan kapasitas untuk tindakan kolektif (administrasi) saling memperkuat satu sama lain dalam sebuah umpan balik yang positif untuk meningkatkan kualitas dan dinamika kolaborasi.

5. Model Collaborative Governance

Menurut Ansell dan Gash (2007) collaborative governance adalah proses kegiatan kolaborasi dengan mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh beberapa lembaga publik dengan pihak lain yang terkait dan

terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Guna mendapatkan tujuan yang maksimal dalam melaksanakan Collaborative Governance, Ansell dan Gash memberikan model teori Collaborative Governance yang didalamnya terbagi menjadi beberapa dimensi, yang dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 2.1 Model Collaborative Governance



Sumber: Ansell and Gash (2007:550)

Berdasarkan gambar di atas, Ansell dan Gash telah membagi empat dimensi dalam Collaborative Governance meliputi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi yang selanjutnya akan dijelaskan berikut ini:

1) Kondisi Awal

Menurut Ansell and Gash (2007:550) Kondisi awal ini yang kemudian menjadi pemicu timbulnya keinginan para pihak yang terlibat untuk

melakukan kolaborasi baik itu dari pemerintah dan lembaga lainnya untuk turut terlibat. Keinginan atau kebutuhan kolaborasi akan timbul apabila telah merasakan suka duka bersama ataupun pernah mengalami kegagalan bersama, yang secara tidak langsung menumbuhkan kesetiakawanan melalui bentuk kerjasama bersama atau kolaborasi. Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar stakeholder, masing-masing aktor memiliki latar belakang yang berbeda, namun permasalahan yang sedang dihadapi memiliki kesamaan yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Kondisi awal dalam suatu kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa fenomena, yaitu para stakeholders memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan adanya kecemasan publik. Terdapat tiga hal yang dapat mempengaruhi kondisi awal dalam memulai kolaborasi yaitu:

- a. Ketidakseimbangan Sumber Daya
- b. Ketersediaan insentif untuk berpartisipasi
- c. Adanya ketakutan terjadinya konflik

2) Desain Kelembagaan

Menurut Ansell And Gash (2007:555-557) bahwa Aspek penting lain yang perlu mendapat perhatian adalah kejelasan aturan dan prosedur. Peraturan harus ditegakkan secara adil, transparan dan terbuka, sehingga para pemangku kepentingan dapat meyakini bahwa setiap musyawarah dan negosiasi yang dilakukan adalah nyata dan bukan sekedar basa-basi untuk menutupi kesepakatan rahasia. Pemimpin meminta para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam negosiasi itikad baik dan mengeksplorasi,

kompromi dan perolehan bersama. Menurut model collaborative governance Ansell dan Gash dimensi desain kelembagaan dalam kolaborasi meliputi partisipasi, forum terbatas, aturan dasar sebagai pendukung kolaborasi dan transparansi.

3) Kepemimpinan Fasilitatif

Unsur kepemimpinan dalam kolaborasi tidak hanya diperuntukan bagi pemimpin pemerintahan atau pemimpin lembaga atau instansi organisasi, akan tetapi siapapun bisa menjadi pemimpin yang fasilitatif selama ia bisa menggerakkan, memfasilitasi serta mendorong untuk mensukseskan tujuan dari kolaborasi itu sendiri. Siapapun bisa menjadi pendorong serta memfasilitasi dan sebagai penghubung dan memimpin aktor atau stakeholder dalam kolaborasi dapat disebut pemimpin yang fasilitatif. Dalam kepemimpinan fasilitatif, fasilitas diberikan tanpa mengganggu pada hak para pemangku kepentingan, peran fasilitator adalah untuk memastikan integritas proses pembentukan konsensus itu sendiri. Kepemimpinan sangat penting untuk menetapkan dan mempertahankan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan menjelajahi keuntungan bersama.

4) Proses Kolaborasi

Ansell dan Gash (2007:557-561) mendefinisikan 3 (tiga) tahapan proses kolaborasi yaitu *problem setting* (penentuan permasalahan), *Direction Setting* (penentuan tujuan), dan pelaksanaan. Proses kolaborasi yang terjadi bersifat tidak teratur dan tidak linear. Kolaborasi seringkali dipandang hanya bergantung pada pencapaian yang mengacu pada tujuan yang ideal seperti komunikasi, kepercayaan, komitmen, saling memahami,

dan hasil. Meskipun proses kolaborasi terjadi secara tidak teratur akan tetapi komunikasi adalah jantung dari kolaborasi sehingga kita memulai analisa dari dialog tatap muka (Face to Face), membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan saling memahami.

D. Program Lorong Wisata

1. Konsep Program

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan (Muhaimin, Suti'ah dkk, 2009).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), program adalah konsep prinsip dan kegiatan (dalam penyelenggaraan negara, perekonomian, dll) yang akan dilaksanakan. Jika membahas secara konsep, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa program merupakan instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh badan/organisasi utama yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk mencapai keinginan dan tujuan serta menerima alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh organisasi masyarakat.

Pariata Westra dkk. (1989:236) menyatakan bahwa "Sebuah program adalah

suatu rumusan yang menggambarkan pekerjaan yang harus dilakukan dengan petunjuk bagaimana melakukannya”. Selanjutnya Sondang P. Siagian (2006:17) “Perumusan program kerja adalah detail, bukan rencana. Untuk pembangunan negara, program kerja dilakukan dalam berbagai bentuk dan kegiatan. Terry dalam Tachjan (2006:31), menjelaskan bahwa program merupakan rencana induk yang menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan diintegrasikan menjadi satu kesatuan. Program menggambarkan tujuan, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan anggaran.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa program merupakan bentuk rencana yang dijalankan dengan integritas dengan melibatkan semua pihak dengan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini dapat juga dikatakan bahwa suatu program adalah bagian dari suatu kebijakan yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Charles O. Jones (1996:295), beberapa ahli menyarankan di antara mereka sendiri bahwa karakteristik tertentu yang dapat membantu individu menentukan apakah suatu kegiatan adalah program adalah:

- 1) Program cenderung mengarahkan kepada karyawan, seperti pelaksana atau aktor dalam program.
- 2) Program biasanya memiliki anggaran sendiri, terkadang program juga ditentukan melalui anggaran.
- 3) Program memiliki identitasnya sendiri, yang jika dikelola dengan baik, dapat dikenali oleh publik.

2. Konsep Lorong Wisata

Konsepsi pemberdayaan masyarakat ala kemandirian lokal merekomendasikan agar pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan

ketersediaan sumber daya lokal dengan mengacu kepada karakteristik spesifik yang dimiliki (Amien, 2005). Sependapat dengan hal tersebut Arianto dan Eliza (2013) mengemukakan bahwa selain memanfaatkan sumber daya, proses yang terjadi dalam konteks lokal harus mendapatkan perhatian khusus dan menjadi dasar pembangunan dan penguatan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka wujud kemandirian lokal di masyarakat tercipta jika masyarakat mampu memanfaatkan segenap potensi atau sumber daya yang ada disekitarnya. Salah satu wujud kemandirian lokal yang tercipta dari upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pemberdayaan kawasan lorong di Kota Makassar. Ratusan lorong di kota Makassar telah mengalami revitalisasi dan pembenahan dengan berbagai program yang menyentuh seluruh aspek kehidupan warga lorong.

Penataan lorong yang diprogramkan Pemerintah Kota Makassar dan diberi nama Lorong Wisata merupakan serangkaian bentuk pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga lorong yang menjadi tempat tinggal mereka. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Peternakan (KP3) Kota Makassar, terdapat 7.538 lorong yang dihuni sekitar 535.000 orang. Untuk itu program Lorong Wisata merupakan program strategis pemerintah kota dalam menata dan memberdayakan masyarakat Makassar. Walikota Makassar membuat program Lorong Wisata yang diluncurkan pada 17 Agustus 2022 yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI dan mengharapkan program lorong wisata akan menjadi program unggulan yang akan mengenalkan Kota Makassar pada dunia serta berbagai program strategis dari masing-masing bagian diharapkan mampu disinkronkan agar menjadi lebih kompleks.

Walikota Makassar membentuk Dewan Lorong yang disingkat D'Lor, mereka bertugas di Lorong Wisata, sebagai motivator bagi warga yang ada di lorong, menjaga properti lorong dan mensosialisasikan program pemerintah Kota Makassar. Adapun tujuan lorong wisata yaitu 1) Program ini diharapkan sebagai bentuk upaya mendorong pemulihan ekonomi; 2) Membangun kesadaran/perilaku warga akan pentingnya kebersihan dan keindahan lorong; 3) Mengaplikasikan ide kreatifitas warga sekitar; 4) Mengenalkan Makassar pada Dunia. Pembentukan Program Lorong Wisata dibuat atas dasar Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 dimana program ini merupakan perwujudan kebangkitan ekonomi masyarakat di kota Makassar setelah pandemi COVID-19. Setiap kelurahan di kota Makassar sejak awal peluncuran program Lorong Wisata tahun 2022 telah mengupayakan untuk membuat 7 (tujuh) Lorong Wisata yang merupakan target dari Walikota Makassar yaitu membuat tujuh Lorong Wisata di setiap kelurahan di Kota Makassar dimana pada setiap Lorong Wisata memiliki penanggung jawab masing-masing.

Manfaat Lorong Wisata yaitu sebagai basis ekonomi kebangkitan yang di dalamnya berisi edukasi kesejahteraan dan menanamkan mental mandiri pada warga pada setiap lorong serta local influencer. Lorong Wisata diharapkan mampu menempatkan Kota Makassar sebagai salah satu daerah destinasi bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara dengan beraneka ragam kulinernya seperti kacang disco, kerupuk bawang, bakso, gado-gado, mie kuah dan mie goreng. Sedangkan potensi tanaman yaitu tanaman hias, apotik hidup/sayuran, tanaman buah dan juga membuat mural dengan hiasan tanaman.

Tak hanya itu, Lorong Wisata juga mengembangkan potensi kerajinan tangan daur ulang seperti tempat tisu, pot bunga, sandal dan kerajinan lainnya dengan bahan daur ulang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan acuan dasar yang berkaitan dengan penelitian Collaborative Governance dan menggunakan Teori Ansel and Gash (2007), yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu
Elsa Trisniati, Juliannes Cadith dkk (2021)	Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	<p>Penelitian ini menggunakan collaborative governance model dari Ansell & Gash (2008) untuk mendeskripsikan tata kelola kolaboratif (collaborative governance) pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Dengan mengacu pada model Ansell & Gash (2008: 549-550), penelitian ini menggunakan empat dimensi collaborative governance, yaitu</p> <p>1) Kondisi Awal, Dalam penelitian collaborative governance dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung masih terdapat ketidakseimbangan sumber daya di antara para pemangku kepentingan. PT Banten West Java sebagai pihak swasta dan badan usaha pengelola KEK Tanjung Lesung memiliki sumber daya berupa kekuasaan atas lahan/kawasan dan sumber daya finansial;</p> <p>2) Desain Kelembagaan, Pada kolaborasi pengembangan KEK Tanjung Lesung, partisipasi para pemangku kepentingan dalam berkolaborasi masih kurang. Hal ini terjadi karena keterbatasan peran dari status pemangku kepentingan itu sendiri;</p> <p>3) Kepemimpinan Fasilitatif, Pada penelitian kolaborasi pengembangan KEK Tanjung Lesung, peran pemimpin atau kepemimpinan fasilitatif masih sangat kurang. Kepemimpinan fasilitatif terdapat pada peran pemerintah yang dapat menjadi mediator komunikasi antara satu pemangku kepentingan dengan</p>

		<p>pemangku kepentingan lain. Akan tetapi pada pemerintah sendiri masih kurang koordinasi, baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten;</p> <p>4) Proses Kolaborasi, Proses kolaborasi dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung dalam perencanaan bersifat koordinasi karena yang menyusun rencana pengembangan KEK adalah pihak swasta sebagai badan pengelola dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sementara dalam pelaksanaan bersifat kolaborasi karena melibatkan masyarakat, media dan akademisi.</p>
Yoseph Molla, Tjahya Supriatna dkk (2021)	Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing di Desa Tebara Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat	<p>Penelitian ini bertujuan mengamati proses dan faktor-faktor Collaborative Governance dalam pengelolaan kampung wisata Praiijing di desa Tebara kecamatan kota Waikabubak. Metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori Collaborative Governance menurut Ansell and Gash (2007) digunakan sebagai kajian analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kampung wisata belum berjalan secara efektif dilihat dari faktor berikut ini</p> <p>1) Kondisi Awal, pada penelitian ini dijelaskan bahwa suka duka bersama para penggagas dan masyarakat kampung Praiijing menjadi kondisi awal yang membangkitkan keinginan, insentif dan kebutuhan untuk berkolaborasi di antara masyarakat dan penggagas kampung wisata Praiijing;</p> <p>2) Desain Kelembagaan, dimulai dari pembentukan Lembaga- lembaga yang mengelola kampung wisata Praiijing. Dalam hal ini pengangkatan pengurus kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) kampung Praiijing di Desa Bara Kecamatan Kota Waikabubak yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 dan dijabarkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Tebara. Disisi lain juga ada kelembagaan yang juga bersama dengan Kelompok Sadar Wisata untuk memfasilitasi kampung wisata Praiijing melalui Badan Usaha Milik Desa Tebara yaitu Bumdes Iyya Tekki;</p> <p>3) Kepemimpinan Fasilitatif, Dalam kaitannya dengan pengelolaan Kampung wisata Praiijing di Desa Tebara bahwa kepala Desa tebara dapat disebut sebagai pemimpin</p>

		<p>yang fasilitatif, mengingat posisinya yang dapat menjalin komunikasi atau penghubung antara Pemerintah, Swasta, akademisi dan masyarakat;</p> <p>4) Proses Kolaborasi, Dalam Proses Kolaborasi di kampung wisata praiijing, Pemerintah selalu melakukan Pendekatan melalui dialog dan berdiskusi bersama dengan masyarakat dan pengelola kampung wisata Praiijing. Setiap bulan selalu dilakukan rapat rutin membahas terkait dengan pengelolaan kampung wisata Praiijing. Dalam pengelolaan kampung wisata Praiijing membangun kepercayaan merupakan bagian dari proses kolaborasi yang turut dalam membantu proses keberlangsungan kampung.</p>
<p>Hendra Irawan, Nurliah Nurdin (2022)</p>	<p>Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kepulauan Sula</p>	<p>Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan model collaborative governance berdasarkan rujukan oleh Ansell and Gash menggunakan 4 (empat) dimensi untuk mengukur proses yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan hal berikut:</p> <p>1) Kondisi Awal, Kondisi awal kolaborasi yang terjadi dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kepulauan Sula yaitu disebabkan karena 2 faktor yang menyebabkan, pertama adalah belum adanya Talud/ tanggul pembatas saluran air dan pemukiman warga yang kedua adalah naiknya permukaan dasar sungai/kali karena material pasir dan tanah yang dibawa pada saat banjir sehingga apabila curah hujan tinggi dapat menyebabkan banjir;</p> <p>2) Desain Kelembagaan, dalam menghadapi persoalan banjir di Kabupaten Sula tak hanya pihak swasta maupun pemerintah yang terlibat dalam suatu kelembagaan akan tetapi terdapat beberapa Organisasi Masyarakat dan Pemuda yang turut serta mencari dan memberikan bantuan setelah kejadian bencana. Elemen mahasiswa dan pemuda yang langsung datang ke lokasi tersebut diantaranya Serikat Pemuda Kepulauan Sula (SEKEPAL), Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gema Rakyat), Solidaritas Fina Sua (SOFIA), Aliansi Pemuda Sula (APS), dan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND);</p>

		<p>3) Kepemimpinan Fasilitatif, Penanggulangan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dapat disebut sebagai pemimpin yang fasilitatif, mengingat posisinya dalam penanggulangan banjir sebagai Sekretaris Daerah, Ex Officio Kepala BPBD yaitu sebagai instansi dan lembaga yang menangani permasalahan banjir sehingga proses kolaborasi dalam menjalin komunikasi dan penghubung antara pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat;</p> <p>4) Proses Kolaborasi, Collaborative Governance dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula melalui pendekatan teori Ansell and Gash yang peneliti amati bahwa proses kolaborasi terjadi dalam 3 tahap, yaitu 1) Tahap pra bencana, 2) Tahap tanggap darurat, 3) Tahap pasca bencana belum berjalan dengan maksimal, hal ini dilihat dari belum dilibatkannya pemangku kepentingan/ aktor yang lain dalam berkolaborasi, yaitu Akademisi atau perguruan tinggi. Kurangnya sumber daya dari sisi Anggaran maupun Peralatan mengakibatkan penanggulangan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula berjalan tidak maksimal, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya alat berat (Eksavator) untuk melakukan normalisasi dan minimnya anggaran penanggulangan bencana untuk pembuatan Talud/ tanggul.</p>
--	--	--

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian permasalahan dan tinjauan pustaka diatas maka peneliti merancang kerangka pikir dengan teori dimensi collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007). Pemilihan teori tersebut dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana Collaborative Governance terjadi dalam Program Lorong Wisata di Kota Makassar dengan menggunakan empat variabel berikut ini:

1. Kondisi Awal

Kondisi Awal dalam Collaborative Governance sangat menentukan dasar dari tingkat kepercayaan, masalah/konflik serta modal sosial yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam Collaborative Governance. Kondisi awal dalam suatu kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa fenomena, yaitu para stakeholders memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan adanya kecemasan publik.

2. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan menjadi aturan dasar dalam kegiatan kolaborasi. Menurut model collaborative governance Ansell dan Gash dimensi desain kelembagaan dalam kolaborasi meliputi partisipasi, forum terbatas, aturan dasar sebagai pendukung kolaborasi dan transparansi. Desain kelembagaan juga mencakup bagaimana peran masing-masing *stakeholder* selama kolaborasi berlangsung.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

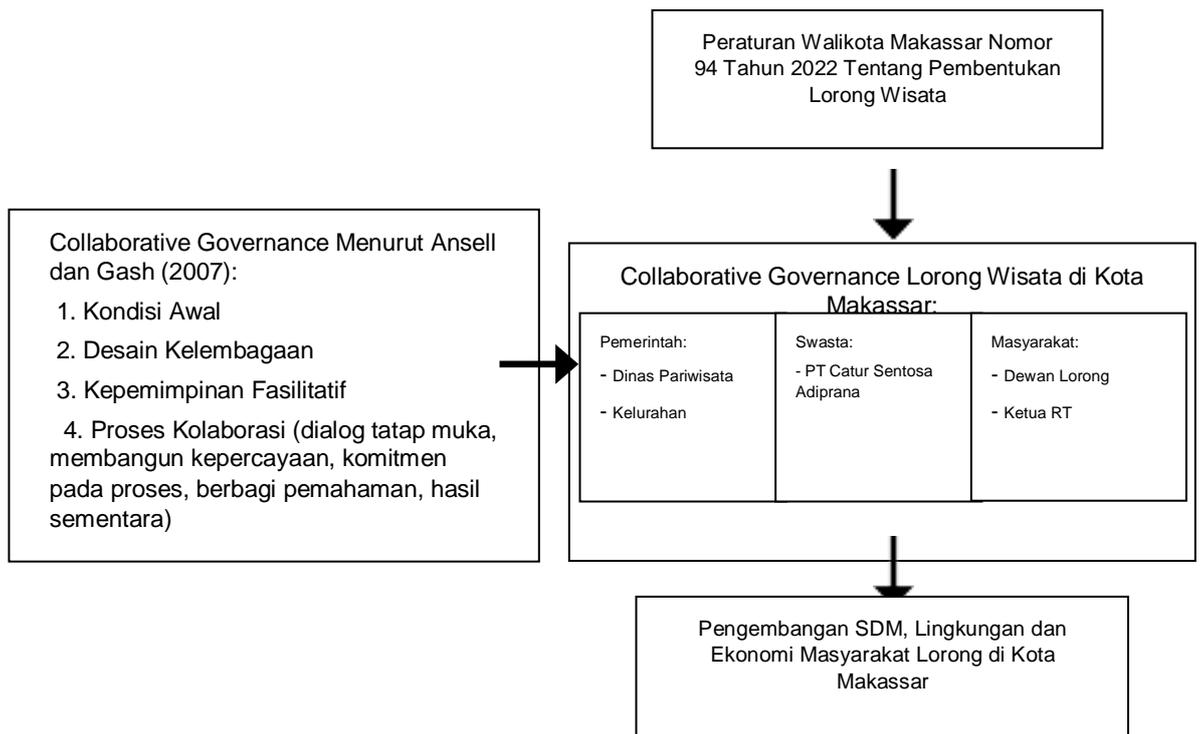
Kepemimpinan fasilitatif dalam collaborative governance merupakan pemimpin yang menjadi mediator sekaligus fasilitator dalam Collaborative Governance. Siapapun bisa menjadi pendorong serta memfasilitasi dan sebagai penghubung dan memimpin aktor atau stakeholder dalam kolaborasi dapat disebut pemimpin yang fasilitatif.

4. Proses kolaborasi

Proses Kolaborasi menjadi inti dari Collaborative Governance dimana dalam proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash meneliti proses kolaborasi mencakup dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), Komitmen terhadap proses

(commitment to process), berbagi pemahaman (shared understanding) dan hasil sementara (intermediate outcomes).

Gambar 2.2 Kerangka Pikir



Sumber: diolah peneliti, 2023.